

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJiP)**

KECAMATAN BENGO

2022

KALEIDOSKOP KANTOR CAMAT BENGO TAHUN 2022

1. JANUARI

Penandatanganan PK Tahun 2022



2. Februari

Bimtek LKJIp



3. Maret

Zoom Meeting Launching Core Values BERAKHLAK dan Employer Branding



4. April

Penyaluran BLT DD Di Desa Selli



5. Mei

Korpri berbagi



6. Juni

Pembentukan Panitia wisata Danau di desa samaenre



7. Juli

Sosialisasi dan Validasi Bimtek DTKS



8. Agustus

Money Desa Bulu



9. September



10. Oktober
Serah Terima Jabatan



11. November
District Multi-Stakeholder Forum



12. Desember
Pelantikan Kepala Desa



KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat tuhan yang maha kuasa atas rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bengo Tahun 2022. LKjIP Kecamatan Bengo Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata d Kecamatan Bengo dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan

secara teknis diatur Dalam Peraturan Menteri Pan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Kecamatan Bengo telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Kecamatan Bengo. Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan rencana strategis (renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. secara keseluruhan, penyelenggaraan program dan kegiatan Kecamatan Bengo telah banyak membuahkan hasil pembangunan.

Capaian kedua indikator kinerja utama Kecamatan Bengo telah memenuhi kriteria sangat baik. Hasil kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus dan berkelanjutan. Meskipun semua indikator sudah tercapai, namun masih ada beberapa kekurangan yang perlu dilakukan perbaikan demi mendukung terwujudnya good governance. demikian LKjIP ini kami susun semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja sektor Kecamatan Bengo di masa mendatang.

Matango, 28 Februari 2023


ANDI RIZKY PRATAMA, S.STP, M.Si
Pangkat : Penata TK.I / III.d
Nip : 19911116 201206 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN



UMUM



ORGANISASI



ISU STRATEGIS



ASPEK STRATEGIS

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP tingkat Pemerintahan Kota disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kinerjanya, dampak yang diharapkan adalah terwujudnya *clean government* dan *good governance* pada Kecamatan Bengo Kabupaten Bone.

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kecamatan Bengo merupakan salah satu dari 27 Kecamatan di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas Wilayah 164 Km² dengan Jumlah Penduduk 29,981 Jiwa dan Jumlah KK. 8,846 dengan jarak 52 km dari Kota Kabupaten Bone.

Kecamatan Bengo termasuk wilayah yang beriklim sedang dengan temperatur udara rata-rata berkisar 20°C-30°C. Kecamatan Bengo terdiri dari 9 (Sembilan) Desa, 1 (Satu) UPT Kesehatan yang berada di Desa Selli, 1 UPT Pendidikan, 1 UPT KB & KS dan 1 BPP.

Secara Geografis Kecamatan Bengo terletak pada sebelah Barat Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ulaweng dan Lamuru
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ponre
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lappariaja dan Ponre
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lapri dan Lamuru

a. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Kecamatan Bengo memiliki 9 Desa dengan ketinggian diatas permukaan laut 454 M yakni :

1. Desa Lilirawang
2. Desa Mattirowalie
3. Desa Mattaropuli
4. Desa Bengo
5. Desa Bulu Allaporeng
6. Desa Selli
7. Desa Tungke
8. Desa Walimpong
9. Desa Samaenre

PETA KECAMATAN BENG



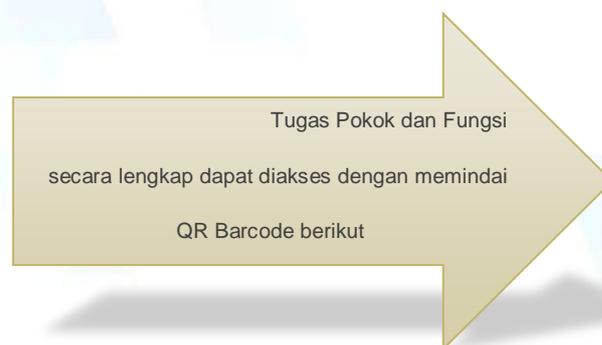
Kecamatan Bengo memiliki luas tanah sawah 3653 Ha, dan tanah kering 8875 Ha, lahan tersebut didominasi untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan, sedangkan dari sektor ekonomi Kecamatan Bengo memiliki 3 pasar yang digunakan sebagai sarana dalam perekonomian masyarakat, kedua pasar tersebut merupakan pasar tradisional.

Salah satu aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah dibukanya peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan pembangunan, termasuk aspek perencanaan. Ruang yang disiapkan bagi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang yang dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai tingkat Nasional.

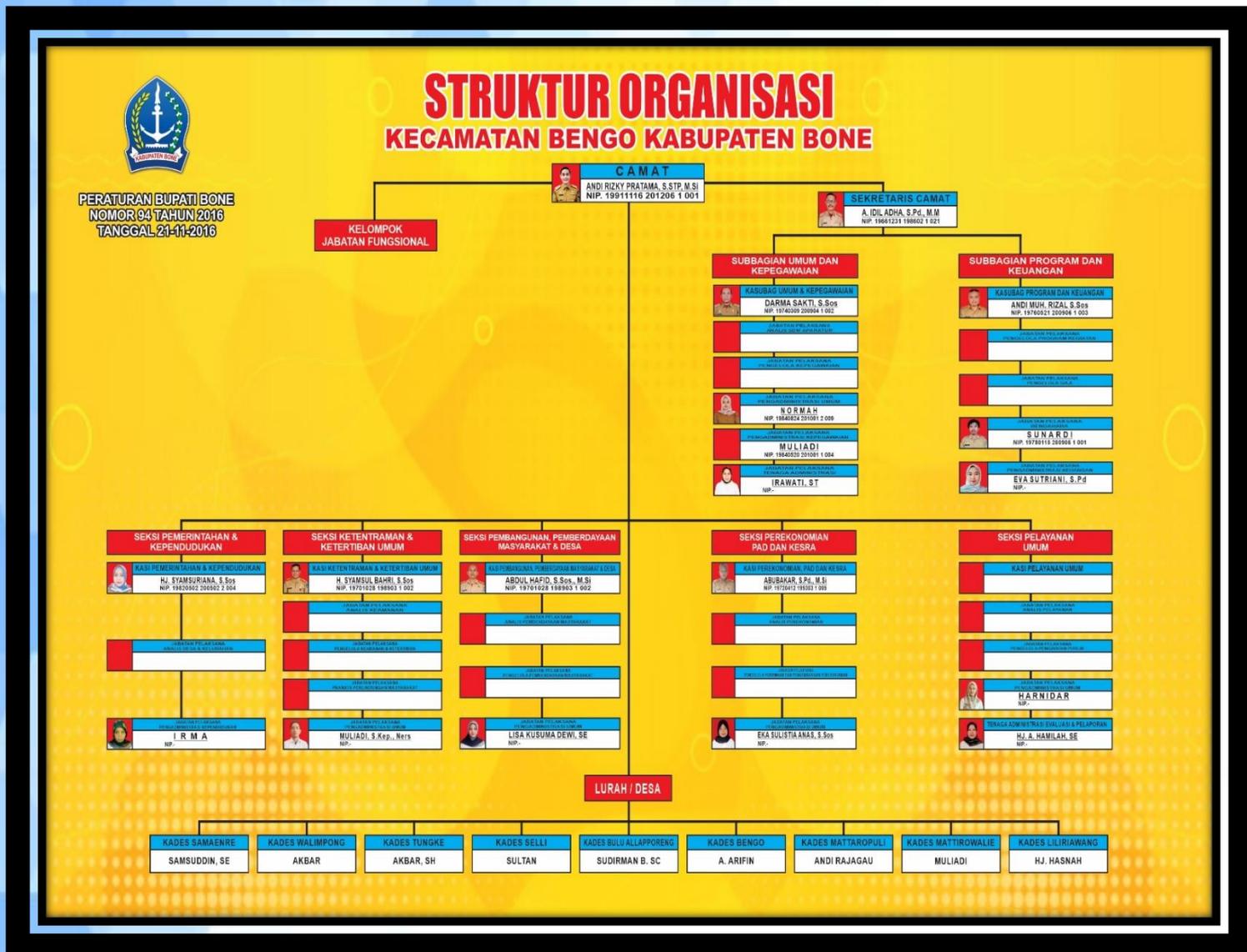
A. ORGANISASI

Tugas Pokok Kecamatan Bengo yang dipimpin oleh Camat adalah membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah Kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BENGO



SUMBER DAYA KECAMATAN BENGO

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Bengo mempunyai 11 orang PNS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Susunan Pegawai Kecamatan Bengo

| NO | SUSUNAN KEPEGAWAIAN | JUMLAH PERSONIL |
|----------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | CAMAT | 1 |
| 2 | SEKERTARIS CAMAT | 1 |
| 3 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 1 |
| | - Pengadministrasi Umum | 1 |
| | - Pengadministrasi Kepegawaian | 1 |
| | - Analis Data dan Informasi | - |
| | - Pramu Bakti | - |
| 4 | SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN | 1 |
| | - Pengelola Gaji | - |
| | - Bendahara | 1 |
| | - Pengadministrasi Perencanaan dan Program | - |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| 5 | KASI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN | 1 |
| - | Pengadministrasi Kependudukan | - |
| - | Pengadministrasi Pemerintahan | - |
| - | Analisis Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah | - |
| 6 | KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1 |
| - | Analisis Keamanan | - |
| - | Pengadministrasi Umum | - |
| - | Analisis Desa dan Kelurahan | - |
| 7 | KASI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA | 1 |
| - | Analisis Pemberdayaan Masyarakat | - |
| - | Pengadministrasi Umum | - |
| 8 | KASI PEREKONOMIAN, PAD DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL | 1 |
| - | Pengadministrasi Umum | - |
| - | Analisis Perekonomian | - |
| 9 | KASI PELAYANAN UMUM | - |
| - | Pengadministrasi Umum | - |
| - | Analisis Pelayanan | - |
| JUMLAH | | 11 |

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan Bengo

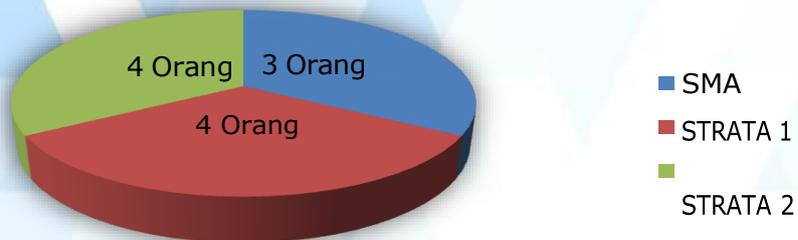
SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN BENGO

Jumlah
Pegawai Pria
Sebanyak 9
orang dari 11
Pegawai



Jumlah
Pegawai Pria
Sebanyak 9
orang dari 11
Pegawai

Jenis Pendidikan



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan Bengo 2022

Tabel. 1.2 Komposisi SDM Organisasi

| KOMPOSISI SDM ORGANISASI UNIT KERJA KECAMATAN BENGO | | | | | | | | |
|---|------------------|-----|--------|------|-----|--------|------------|-----|
| N O | JENIS PENDIDIKAN | JML | N O | GOL. | JML | NO | JABATAN | JML |
| 1 | SD | - | 1 | I | | 1 | STRUKTURAL | 11 |
| 2 | SMP | - | 2 | II | | 2 | FUNGSIONAL | |
| 3 | SMA | 3 | 3 | II | 3 | | | |
| 4 | DIPLOMA 1 | - | 4 | III | 5 | | | |
| 5 | DIPLOMA 2 | - | 5 | IV | 3 | | | |
| 6 | DIPLOMA 3 | - | | | | | | |
| 7 | STRATA 1 | 4 | | | | | | |
| 8 | STRATA 2 | 4 | | | | | | |
| JUMLAH | | 11 | JUMLAH | | 11 | JUMLAH | | 11 |

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan Bengo 2022

B. ISU STRATEGIS

Isu Strategis, adalah merupakan suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternative pemecahannya. Adapun isu strategis yang dihadapi Kecamatan Bengo adalah sebagai berikut :

- Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Bengo sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih

- e. rendah.
- f. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
- g. Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi, Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga Tahun 2030 yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.
- h. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Pandemi corona virus (Covid-19) menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Pandemi ini menyebar ke Indonesia, hampir seluruh sektor menerima dampak negatifnya, tidak hanya sosial, kesehatan dan pendidikan, tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian.
- i. Penanggulangan Pencegahan Stunting di wilayah Indonesia sudah berbagai program dan upaya yang dikeluarkan oleh unsur pemerintah bekerjasama dengan pihak kesehatan agar pencegahan Stunting di Indonesia berkurang demi upaya menciptakan anak bangsa yang sehat.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam upaya usaha peningkatan kinerja Kecamatan Bengo Kabupaten Bone maka dilaksanakan beberapa strategi antara lain :

- a. **Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur, khususnya yang terkait penyediaan pelayanan dasar seperti sarana dan prasarana belajar, fasilitas kesehatan, sanitasi layak, air bersih, pengelolaan persampahan.**
- b. **Peningkatan jangkauan serta kapasitas pembinaan kepada masyarakat**
- c. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).**
- d. **Peningkatan partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang ada di lingkungan Kecamatan Bengo.**
- e. **Penyediaan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga meningkatkan produktivitas aparatur.**

Jenis Pelayanan

- a. **Pelayanan Permohonan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**
- b. **Pelayanan Pengurusan Kartu Keluarga**
- c. **Pelayanan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik**
- d. **Pelayanan Pengurusan Pindah Penduduk Dalam Kota Watampone**
- e. **Pelayanan Pengurusan Pindah Penduduk Keluar Kota Watampone**
- f. **Pelayanan Pengurusan Akte Kelahiran dan Kematian**
- g. **Pelayanan Surat Keterangan Waris**
- h. **Pelayanan Pernyataan Domisili**
- i. **Pelayanan Pernyataan Domisili Usaha**
- j. **Pelayanan Pernyataan Beda Nama/Identitas**
- k. **Pelayanan Pernyataan Rekomendasi/Izin Indikator ini diporeleh**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan merupakan pernyataan yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (Tiga) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bengo, maka Kecamatan Bengo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023

| Tujuan/Sasaran | Indikator | Target Kinerja Pada Tahun ke- | | | | |
|--|--|-------------------------------|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan | Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip | - | B | BB | BB | BB |
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 75 | 85 | 90 | 95 | 95 |

Sumber Data: Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

⇒ STRATEGI

Strategi Perangkat Daerah merupakan langkah-langkah prioritas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka waktu menengah perangkat daerah.

Untuk pencapaian tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Bengo, maka ditetapkan strategi yaitu :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen Kecamatan.

⇒ ARAH KEBIJAKAN

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah/perangkat daerah sebagai penjabaran strategis, arah kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Bengo, maka ditetapkan arah kebijakan yaitu :

1. Mengembangkan sistem operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.

Strategi dan Arah Kebijakan dapat ditunjukkan melalui table berikut :

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| VISI I : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA | | | |
|--|---|---|--|
| MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN. | | | |
| TUJUAN | INDIKATOR | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bengo | Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip | Mengoptimalkan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen Perangkat Daerah | Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum. |
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Optimalisasi Pelayanan Kepada Masyarakat | |

Sumber Data : Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023

⇒ INDIKATOR KINERJA

IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bengo digunakan untuk mengukur kinerja utama atau keberhasilan organisasi pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bengo ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone

Pada bagian ini juga dikemukakan indikator Kinerja Utama Kecamatan Bengo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel berikut ini:.

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bengo

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Tahun | | | | |
|----|---|---|-------|------|------|------|------|
| | | | 2019 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 |
| 1 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan | Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip | - | - | BB | BB | BB |
| | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

Sumber Data : Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023

⇒ PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bengo Kabupaten Bone merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bengo Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023, dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan Bengo Kabupaten Bone Tahun 2022 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), dimana pada Tahun 2023 Kecamatan Bengo Kabupaten Bone Tahun 2023 menetapkan target-target kinerja sebagaimana target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) tersebut.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Bengo Tahun 2023

| Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program | Anggaran |
|--|---|--------|--|----------------|
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP | BB | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | 10.765.312.805 |
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang Dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan | 99 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 16.376.890 |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 15.000.000 |
| | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 27.000.000 |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 6.750.000 |
| JUMLAH | | | | 10.830.439.692 |

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Tahun 2023



Perjanjian Kinerja secara lengkap dapat diakses dengan memindai QR Barcode berikut:

B. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Bone. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Bengo Kabupaten Bone dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian Kecamatan Bengo Kabupaten Bone dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kinerja Kecamatan Bengo Kabupaten Bone.

Tabel 2.5 Standar Penilaian Kinerja

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

| Nilai % | Pencapaian |
|-------------------|---------------------------------|
| 110 ke atas | Sangat tercapai/Sangat berhasil |
| $90 \leq x < 110$ | Tercapai/Berhasil |
| $60 \leq x < 90$ | Cukup tercapai/Cukup berhasil |
| $x < 60$ | Tidak tercapai/Tidak berhasil |

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

JENIS PELAYANAN

- a. Pelayanan Permohonan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**
- b. Pelayanan Pengurusan Kartu Keluarga**
- c. Pelayanan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik**
- d. Pelayanan Pengurusan Pindah Penduduk Dalam Kota Watampone**
- e. Pelayanan Pengurusan Pindah Penduduk Keluar Kota Watampone**
- f. Pelayanan Pengurusan Akte Kelahiran dan Kematian**
- g. Pelayanan Surat Keterangan Waris**
- h. Pelayanan Pernyataan Domisili**
- i. Pelayanan Pernyataan Domisili Usaha**
- j. Pelayanan Pernyataan Beda Nama/Identitas**
- k. Pelayanan Pernyataan Rekomendasi/Izin Indikator ini diporeleh**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

❖ CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Kecamatan Bengo Kabupaten Bone sesuai dengan Pengukuran Kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target / rencana masing-masing misi Kecamatan Bengo dengan cara mencapainya melalui sasaran, indikator kinerja utama, kebijakan, program dan kegiatan serta disusun sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui tingkat prosentasi pencapaian masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2022, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Kemudian dilakukan pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Bengo meliputi :

Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Libureng dengan indikator:

⇒ Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP

Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator:

⇒ Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja Tahun 2022 sebagai berikut:

1. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Capaian kinerja tahun anggaran 2022 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2022 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2022 | Realisasi 2022 | Capaian 2022 | Keterangan |
|--|---|----------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan | Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP | BB | BB | 100% | Tercapai/Berhasil |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan | 80 | 100,44% | 125,55 % | Sangat Tercapai/Sangat Berhasil |

Sumber Data: Data Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Tabel di atas, rata-rata capaian antara tujuan dan sasaran strategis kecamatan yang didukung oleh 2 indikator kinerja utama didapatkan predikat dengan nilai 125,55% untuk indikator pertama *Sangat Tercapai*, sedangkan untuk sasaran indikator kedua telah *Sangat Tercapai*.

2. REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018-2023

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Bengo 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Bengo apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2018-2020

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Indikator Kinerja | Capaian | | |
|--|--|---|---------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan | Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP | Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan | 100% | 100% | 100% |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Persentase pelayanannya Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan | Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ditangani | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa | 100% | 100% | 100% |

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2019-2023

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Data Awal 2018 | Realisasi Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | |
|--|---|----------------|-------------------|-------|-------|--------|------|-----------------|-------|-------|--------|------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan | Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP | B | B | B | B | | | - | - | 100% | | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan | 95 | 96,22 | 97,48 | 98,92 | 100,44 | | 96,22 | 97,48 | 98,92 | 100,44 | |
| Rata-rata | | 95 | 96,22 | 97,48 | 98,92 | 100,44 | | 96,22 | 97,48 | 98,92 | 100,44 | |

Sumber Data: Dokumen Perubahan Renstra 2018-2023 Kec. Bengo

Berdasarkan Tabel 3.3 dan 3.2 diatas dapat dijelaskan bahwa hanya 1 indikator kinerja utama kecamatan Bengo yang dapat disandingkan persentase capaian kinerjanya dengan Tahun sebelumnya yaitu indikator Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan. Indikator ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk indikator predikat Hasil SAKIP oleh APIP persentase capaian kinerjanya belum dapat disandingkan karena merupakan IKU Baru, tetapi realisasi kinerja pada indikator ini selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2019, 2020 dan 2021 tidak mengalami peningkatan (*stagnan*) dengan Predikat B.

3. REALISASI KINERJA YANG MENGACU PADA TARGET JANGKA MENENGAH RENSTRA

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Kecamatan Bengo Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Jangka Menengah | Realisasi Kinerja | | | | |
|---|---|------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|------|
| | | | 2019 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 |
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan | Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip | A | B | B | B | | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan | 95 | 96,22 | 97,48 | 98,92 | 125,55 | |

Sumber Data: Dokumen Perubahan Renstra 2018-2023 Kec. Bengo

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk Indikator kinerja utama yang pertama Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip belum mencapai jangka menengah, sedangkan untuk indicator kedua Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan telah mencapai target jangka menengah, sehingga target tahun berikutnya akan disesuaikan.

4. REALISASI KINERJA DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL / STANDAR NASIONAL LAINNYA

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Bengo dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.5 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal /Standar Nasional Lainnya

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja 2022 | Standar Nasional | |
|--|---|------------------------|------------------|----------------|
| | | | Target 2022 | Realisasi 2022 |
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan | Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip | 95 | - | - |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan | 98,92 | - | - |

Sumber Data: Dokumen Perubahan Renstra 2018-2023 Kec. Bengo

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Bengo tidak dapat disandingkan dengan standard nasional karena tidak melaksanakan Standar Pelayanan Minimal/standar nasional lainnya.

5. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.6 Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

| Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | % Capaian | Rata-rata Capaian | Predikat | | | |
|--|---|-----------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | | | | >110 | 90= \leq s/d<110 | 60= \leq s/d<90 | <60 |
| | | | | Sangat Berhasil | Berhasil | Cukup Berhasil | Tidak Berhasil |
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan | Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip | 100% | 100% | | √ | | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan | 125,55% | 125,55% | √ | | | |

Sumber Data : Data Pengukuran Kinerja Tahun 2022 Kec. Bengo

Berdasarkan data pada table 3.6, dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Bengo tahun 2022 dalam kategori *Sangat Berhasil*

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan : **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bengo dengan indikator:**

⇒ **Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP**

Hasil evaluasi oleh Apip adalah penilaian tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah

yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Pemanfaatan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah tergantung pada pengguna hasil evaluasi/kebijakan pimpinan/unit kerja dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada di masing-masing perangkat daerah secara berkelanjutan

Indikator ini diporeleh capaian kinerja 100 %, hal ini didukung oleh :

1. Perencanaan strategis telah dilakukan perubahan melalui perubahan Renstra 2018-2023 untuk menyelaraskan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bengo.
2. Telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala (per Triwulan).
3. Capaian Indikator kinerja Utama Kecamatan Bengo Tahun 2022 diperoleh rata – rata dengan Nilai 125,55 (Sangat Berhasil)
4. Laporan Kinerja Kecamatan Bengo menyajikan data yang informatid dan analisis yang memadai
5. Dilakukan evaluasi kinerja per Triwulan yang dipimpin oleh Camat Bengo.

Meskipun capaian kinerja mencapai 100 % terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya yaitu belum terdapatnya cascading kinerja pelaksana. Upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Bengo untuk meningkatkan predikat SAKIP oleh APIP pada Tahun 2022 melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Kabupaten Bone dan membuat Cascading Kinerja Jabatan Pelaksana.

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator:

⇒ Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan

Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan adalah jumlah pelayanan public yang dilayani/ditindak lanjuti sesuai standar dibagi jumlah pelayanan public yang masuk kali 100%.

Indikator ini diporeleh capaian kinerja 125,55 % hal ini didukung oleh :

- a) Telah tersusunnya Peta Proses Bisnis Kecamatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis
- b) Terdapat SOP pada setiap jenis layanan
- c) Adanya tunjangan Kinerja Pegawai yang menjadi motivasi kerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- d) Telah dilakukan Bimtek Pelayanan Prima kepada beberapa ASN di Kecamatan.
- e) Pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh atasan langsung

Dalam pencapaian indikator ini meskipun 125,55 % diperoleh beberapa hambatan, antara lain :

1. Terjadinya pandemi Covid – 19 yang mengharuskan perubahan SOP dalam melayani masyarakat.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui standar pelayanan.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (Alat perekaman e-KTP)

Adapun solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, antara lain:

- a) Melakukan digitalisasi pelayanan (Online)
- b) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang standar pelayanan masyarakat
- c) Melakukan pemeliharaan alat perekaman e-KTP

6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kecamatan Bengo dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Bengo adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Kecamatan Bengo dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan :

Tabel 3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi Sumber Daya % |
|--|---|---------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Pagu | Realisasi | Capaian (%) | |
| A | B | c | D | e (d/c x100%) | f | g | h (g/f x 100%) | i (e-h) |
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan | Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip | B | B | 100 | 15.396.650 | 15.396.650 | 100% | 100 |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan | 80 | 100,44 | 125,55 | 428.038.000 | 428.038.000 | 100 | 25,55 |

Sumber Data : SPJ Fungsional (C3) Tahun 2022 Kecamatan Bengo

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Kecamatan Bengo terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan capaian kinerja 100% dan persentase capaian realisasi anggaran 100 %, menunjukkan bahwa tidak ada efisiensi.
2. Indikator Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dengan capaian kinerja 125,55 % dan persentase capaian realisasi anggaran 100,44 %, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 100 % dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 25,55 %.

7. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bengo sebagai berikut:

Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

| Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Rencana Tindak Lanjut |
|--|---|-------------|--|---|------------|---------------|-------------|--|
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan | Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip | Nilai B | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (%) | 100 | 100,44 | 100,44 | Akan memperbaiki system perencanaan dan penganggaran |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Realisasi Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 100 | 100 | 100 | Diperlukan kerjasama antar Tim dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam hal pelayanan Publik |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 | 100 | 100.00 | Diperlukan adanya kerja sama antar Tim dalam hal penyelesaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|---|--|------------|---------------|------------|---|
| | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 | 100 | 100 | Diperlukan optimalisasi terhadap stakeholder dan pihak terkait dalam hal koordinasi ketentraman dan ketertiban umum |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa | 100 | | 100 | Diperlukan Stakeholder dalam hal pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| JUMLAH | | | | | 100 | 100,44 | 100 | |

Sumber Data: LPPD Tahun 2022 Kecamatan Bengo

Berdasarkan tabel diatas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

⇒ **Indikator : Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP**

❖ **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

- **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

⇒ **Indikator : Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan.**

➤ **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

➤ **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

➤ **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

➤ **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

➤ **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

b. Upaya perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bengo pada tahun 2022 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

Tujuan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Diperlukan adanya Ketetapan Waktu dalam Hal Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran 1.1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

- Diperlukan adanya Peningkatan Kinerja dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
- Diperlukan kerjasama antar Tim dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan dalam hal pelayanan Publik
- Diperlukan adanya kerja sama antar Tim dalam hal penyelesaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Diperlukan optimalisasi terhadap stakeholder dan pihak terkait dalam hal koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- Diperlukan Stakeholder dalam hal pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

❖ REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Kecamatan Bengo Kabupaten Bone Tahun 2022 setelah perubahan sebesar Rp.9.747.519.398,00 (Sembilan Milyar Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Lima ratus Sembilan belas Ribu Tiga ratus Sembilan puluh delapan Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut :

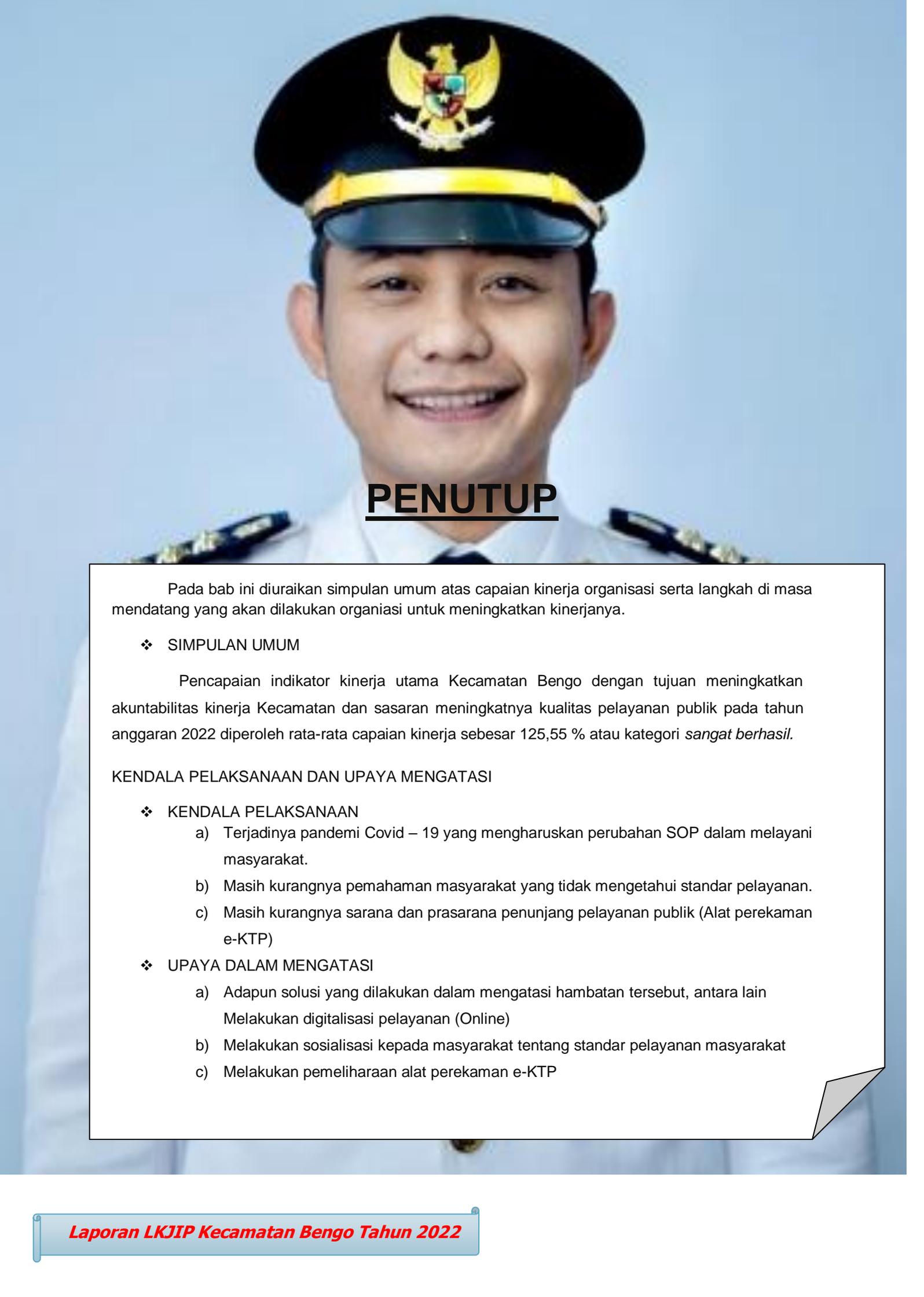
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran

| Uraian | Jumlah (Rp) | | % |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | Anggaran | Realisasi | |
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan | | | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | | |
| Program: | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | 9.658.744.380,00 | 9.701.876.277,00 | 100,45 |
| 1.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 26.928.020,00 | 26.928.020,00 | 100 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 26.928.020,00 | 26.928.020,00 | 100 |
| 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9.300.098.030,00 | 9.345.161.332,00 | 100,48 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.300.098.030,00 | 9.345.161.332,00 | 98,89 |
| Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | 100 |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 100 |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 100 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100 |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|-------|
| 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 155.949.790 | 155.949.790 | 100 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 22.185.430,00 | 22.185.430,00 | 100 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 56.794.360,00 | 56.794.360,00 | 100 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 100 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan | 1.200.000 | 1.200.000 | 100 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 71.870.000 | 71.870.000 | 100 |
| 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 25.000.000 | 24.933.333 | 100 |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 25.000.000 | 24.933.333 | 99,73 |
| 5. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah | 51.076.000 | 48.940.320 | 95,82 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 10.258.940,00 | 8.768.152,00 | 85,47 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 55.315.200,00 | 55.315.200,00 | 100 |
| 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 58.394.400,00 | 58.020.450,00 | 99,36 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 58.394.400,00 | 58.020.450,00 | 99,36 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK | 15.391.650,00 | 15.391.650,00 | 100 |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 15.391.650,00 | 15.391.650,00 | 100 |
| Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaa kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 15.391.650,00 | 15.391.650,00 | 100 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100 |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100 |
| Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 100 |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 27.000.000 | 27.000.000 | 100 |

| | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum | 27.000.000 | 27.000.000 | 100 |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di WilayahKecamatan | 27.000.000 | 27.000.000 | 100 |
| PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 100 |
| 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 100 |
| Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 100 |
| TOTAL | Rp 9.728.136.030,00 | Rp 9.771.267.927,00 | 100,44 |

Sumber : Bendahara Pengeluaran(C3 Desember) Kec. Bengo Tahun 2022



PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

❖ SIMPULAN UMUM

Pencapaian indikator kinerja utama Kecamatan Bengo dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun anggaran 2022 diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 125,55 % atau kategori *sangat berhasil*.

KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASI

❖ KENDALA PELAKSANAAN

- a) Terjadinya pandemi Covid – 19 yang mengharuskan perubahan SOP dalam melayani masyarakat.
- b) Masih kurangnya pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui standar pelayanan.
- c) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (Alat perekaman e-KTP)

❖ UPAYA DALAM MENGATASI

- a) Adapun solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, antara lain Melakukan digitalisasi pelayanan (Online)
- b) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang standar pelayanan masyarakat
- c) Melakukan pemeliharaan alat perekaman e-KTP

LAMPIRAN

1. Cascading Kinerja
2. Perjanjian Kinerja
3. Pengukuran Kinerja
4. Lampiran lainnya, dll.